

TESIS
TINJAUAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP PENGATURAN KEJAHATAN PERANG
DI INDONESIA



MARIA ANASTASIA MI LI

No. Mahasiswa:

235215212

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2025

TESIS
TINJAUAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP PENGATURAN KEJAHATAN PERANG
DI INDONESIA



MARIA ANASTASIA MI LI

No. Mahasiswa:

235215212

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2025



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Maria Anastasia Mi Li
Nomor Mahasiswa : 235215212
Konsentrasi : Litigasi
Judul Tesis : TINJAUAN HUKUM HAK ASASI
MANUSIA TERHADAP
PENGATURAN KEJAHATAN
PERANG DI INDONESIA

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda tangan

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,
LLM.

9 April 2025

2. Dr. Yohanes Triyana, S.H.,
M.Hum.

29-03-2025



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : Maria Anastasia Mi Li
Nomor Mahasiswa : 235215212
Konsentrasi : Litigasi
Judul Tesis : TINJAUAN HUKUM HAK ASASI
MANUSIA TERHADAP PENGATURAN
KEJAHATAN PERANG DI INDONESIA

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan Dewan Penguji

Pada Tanggal 23 April 2025

Dewan Penguji	Nama	Tanda tangan
1. Ketua	Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,LLM.	
2. Sekretaris	Dr. Triyana Yohanes, S.H.,M.Hum.	
3. Anggota	Dr. H. Untung Setyardi, S.H.,M.Hum.	

Ketua Program Studi

Dr. Triyana Yohanes, S.H., MHum

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum**

Prof. Dr. Th. Anna Christiani, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maria Anastasia Mi Li

Nomor Mahasiswa : 235215212

Konsentrasi : Litigasi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “TINJAUAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGATURAN KEJAHATAN PERANG DI INDONESIA”.

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 17 Maret 2025

Yang menyatakan:



Maria Anastasia Mi Li

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya persembahkan atas Berkah dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, bimbingan dan karuniaNya saya dapat menyelesaikan tesis dengan judul “TINJAUAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGATURAN KEJAHATAN PERANG DI INDONESIA”. Saya menyadari dalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan limpah terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Dosen Pembimbing untuk segala bimbingan, masukan, dan arahan selama proses penyusunan tesis ini.
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Dosen Pembimbing untuk segala bimbingan, memberikan masukan, dan arahan dalam proses penyusunan tesis ini.
4. Seluruh Dosen Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya yang telah memberikan pengajaran dan pengetahuan selama ini.
5. Staf Bagian Tata Usaha dan Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dengan setia dan tanggung jawab memberikan pelayanan bagi seluruh mahasiswa.

6. Bapak Kolonel Kum Ardiman Nur, S.H serta seluruh staff dan pegawai Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia yang telah memberikan informasi dan data untuk mendukung tesis ini.
7. Bapak Dr. Uli Parulian Sihombing, S.H., M.H serta seluruh staff dan pegawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang telah memberikan informasi untuk mendukung tesis ini.
8. Bapak Yosep Kalasansius Li, S.S, Mama Lusia Lepe, Kakak Gabriel Posenti Nggori Li dan adik Fransiska Saveria Cabrini Li serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Teman-teman konsentrasi litigasi dan teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Angkatan 2023 atas kekompakan, kerja sama, kebersamaan, dan dukungan selama perkuliahan.
10. Para suster Ursulin dan teman-teman Asrama Pondok Angela yang selalu mendoakan dan mendukung dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam tesis ini tidak menutup kemungkinan ditemukan kesalahan atau kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan tesis ini.

Yogyakarta, 17 Maret 2025
Yang Menyatakan



Maria Anastasia Mi Li

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Pustaka.....	21
1. Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia.....	21
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.....	31
3. Konsep dan Pengaturan Kejahatan Perang.....	36
B. Landasan Teori.....	49
1. Teori Perlindungan Hukum.....	49
2. Teori Penyelesaian Sengketa Internasional.....	51
C. Batasan Konsep.....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Data Penelitian.....	55
C. Cara Memperoleh Data.....	57
D. Metode Analisis Data.....	57
E. Penarikan Kesimpulan.....	57
BAB IV PEMBAHASAN.....	59
A. Kewajiban Pengaturan Kejahatan Perang dalam Hukum Nasional Indonesia.....	59

B. Pengaturan Kejahatan Perang dalam Prespektif Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	63
C. Dampak Tidak Adanya Pengaturan Kejahatan Perang dalam Hukum Nasional Indonesia terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	82
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Aturan yang berkaitan dengan hukum humaniter dalam lingkungan
TNI

ABSTRAK

Kejahatan perang merupakan salah satu pelanggaran serius dalam hukum internasional yang seharusnya mendapatkan pengaturan yang jelas dalam hukum nasional. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum mengakui kejahatan perang sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang hanya mencakup kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum hak asasi manusia terhadap pengaturan kejahatan perang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan politik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kejahatan perang dalam hukum nasional merupakan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh Indonesia berdasarkan perjanjian internasional yang telah diratifikasi, yaitu Konvensi Jenewa 1949. Ketiadaan regulasi yang spesifik menyebabkan kesenjangan dalam penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi korban kejahatan perang. Selain itu, tidak adanya mekanisme yuridis yang jelas juga berpotensi melemahkan komitmen Indonesia dalam menjalankan kewajiban internasionalnya. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan perang belum diakui sebagai pelanggaran HAM berat dalam hukum nasional karena keterbatasan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, belum ada pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme hukum nasional dalam menindak kejahatan perang. Kekosongan regulasi ini berdampak pada ketidakpastian hukum, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya perlindungan bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif guna memastikan kepastian hukum dan pemenuhan kewajiban Indonesia dalam hukum humaniter internasional.

Kata Kunci: Kejahatan Perang; Kejahatan terhadap Kemanusiaan; Pengadilan HAM

ABSTRACT

War crimes constitute serious violations of international law and should be explicitly regulated in national legislation. However, Indonesia has yet to recognize war crimes as gross human rights violations under Law Number 26 of 2000 on Human Rights Courts, which only includes genocide and crimes against humanity. This study aims to analyze the human rights perspective on the regulation of war crimes in Indonesia. This research employs a normative legal method with a legal politics approach. The findings indicate that regulating war crimes within national law is an obligation that Indonesia should fulfill in accordance with international treaties it has ratified, particularly the 1949 Geneva Conventions. The absence of specific regulations creates gaps in law enforcement and human rights protection, especially for war crime victims. Furthermore, the lack of a clear legal mechanism may undermine Indonesia's commitment to fulfilling its international obligations. The study concludes that war crimes are not recognized as gross human rights violations in Indonesian law due to the limitations of Law Number 26 of 2000. Although Indonesia has ratified the 1949 Geneva Conventions, no further legal provisions have been established to address this matter. This regulatory vacuum leads to legal uncertainty, weak law enforcement, and inadequate protection for victims. Therefore, a more comprehensive legal framework is required to ensure legal certainty and Indonesia's compliance with international humanitarian law.

Keywords: War Crimes; Crime Against Humanity; Human Rights Court